

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif. SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Penggunaan PSAP juga dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis SAP. IPSAP dan Buletin Teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rancangan IPSAP paling lambat disampaikan kepada BPK yaitu empat belas hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan. IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Sedangkan Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara rinci penerapan PSAP atau IPSAP.

Basis akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua, yaitu basis kas (*cash basis of accounting*) dan basis akrual (*accrual basis of accounting*). Akuntansi berbasis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika

kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya sehingga dapat menyajikan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah dapat mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintahan berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya yang digunakan tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memuat 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah standar yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

#### **2.1.1.1 PSAP 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan**

PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan membahas tentang tujuan laporan keuangan, tanggung jawab laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, identifikasi laporan keuangan, dan periode pelaporan.

##### **1. Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat

bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

## **2. Tanggung Jawab Pelaporan**

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

## **3. Komponen-Komponen Laporan Keuangan**

Komponen-komponen yang terdapat pada satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Komponen laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

## **4. Identifikasi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari lainnya.

## **5. Periode Pelaporan**

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut :

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun

- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan

#### **2.1.1.2 PSAP 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran**

PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran membahas mengenai tujuan laporan realisasi anggaran dan struktur laporan realisasi anggaran.

##### **1. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRAd dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna untuk pengguna laporan dalam mengavaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran serta menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh dan berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

##### **2. Struktur Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/Defisit-LRA
- e. Penerimaan Pembiayaan
- f. Pengeluaran Pembiayaan
- g. Pembiayaan Netto
- h. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa)

Berdasarkan uraian mengenai laporan realisasi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pos laporan realisasi anggaran, hal yang diungkapkan didalam laporan realisasi anggaran yaitu kegiatan-kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan pada APBN/APBD. Laporan realisasi

anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

#### **2.1.1.3 PSAP 03 Tentang Laporan Arus Kas**

PSAP 03 tentang laporan arus kas membahas tentang tujuan laporan arus kas dan klasifikasi laporan arus kas.

##### **1. Tujuan Laporan Arus Kas**

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini digunakan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu.

##### **2. Klasifikasi Arus Kas**

Klasifikasi arus kas menurut aktifitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktifitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

#### **2.1.1.4 PSAP 04 Tentang Catatan atas Laporan Keuangan**

PSAP 04 tentang catatan atas laporan keuangan membahas tentang struktur dan isi, penyajian informasi tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, penyajian informasi tentang kebijakan fiskal dan ekonomi makro,

penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan. Adapun penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut :

**1. Struktur dan Isi**

Catatan atas laporan keuangan adalah penyajian yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya, diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci atau analisis suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

**2. Penyajian Informasi Tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

Catatan atas laporan keuangan harus memberikan informasi tentang gambaran umum entitas. Seperti domisili dan bentuk hukum suatu entitas dan yurisdiksi tempat entitas itu berada, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

**3. Penyajian Tentang Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro**

Catatan atas laporan keuangan harus dapat membantu pembaca untuk memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.

**4. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan.

Dapat disimpulkan bahwa catatan atas laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya.

#### **2.1.1.5 PSAP 05 Tentang Akuntansi Persediaan**

PSAP 05 tentang akuntansi persediaan membahas tentang pengakuan dan pengukuran, adapun lebih lengkapnya dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Pengakuan**

Persediaan diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil interverisasi fisik.

##### **2. Pengukuran**

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan :

- a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang
- b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak materil dan bermacam-macam jenisnya

#### **2.1.1.6 PSAP 06 Tentang Akuntansi Investasi**

PSAP 06 tentang akuntansi investasi membahas tentang bagaimana klasifikasi investasi, pengakuan dan pengukuran investasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

##### **1. Klasifikasi Investasi**

Investasi pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu investasi jangka pendek yang terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis dan investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya yaitu permanen dan non permanen.

## **2. Pengakuan Investasi**

Pengeluaran kas atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang, atas suatu investasi yang dapat diperoleh pemerintah. Entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat jasa atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan pertama kali. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

## **3. Pengukuran Investasi**

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar digunakan sebagai dasar penetapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai yang tercatat atau nilai wajar lainnya. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

### **2.1.1.7 PSAP 07 Tentang Aset Tetap**

PSAP 07 Tentang Aet Tetap membahas tentang klasifikasi, pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

#### **1. Klasifikasi Aset Tetap**

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut : a) Tanah, b) Peralatan dan Mesin, c) Gedung dan



Bangunan, d) Jalan, Irigasi, Jaringan, e) Aset Tetap Lainnya, f) Konstruksi dalam pengerjaan.

## **2. Pengakuan Aset Tetap**

Aset tetap diakui pada saat masa manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : a) berwujud, b) mempunyai masa manfaat diatas dua belas bulan, c) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, d) biaya perolehan aset dapat diukur secara handal, e) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Menentukan suatu aset tetap apakah mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan, suatu entitas harus menilai masa manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir kesuatu entitas dan dapat dipastikan bila identitas tersebut akan menerima manfaat dan resiko yang terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia bila manfaat dan resiko telah diterima.

## **3. Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya, dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

#### **2.1.1.8 PSAP 08 Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan membahas tentang pengakuan, pengukuran dan pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan.

##### **1. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan, jika : a) besar kemungkinan bila manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, b) biaya perolehan tersebut dapat dinilai secara andal, c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

##### **2. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola : a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, b) biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan yang pada umumnya dan dapat dialokasikan pada kegiatan konstruksi tersebut, c) biaya yang secara khusus dibebankan sehubungan dengan konstruksi yang dikerjakan.

##### **3. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Suatu entitas harus melaporkan kegiatan konstruksi dalam pengerjaan setiap akhir periode pelaporan akuntansi : a) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan bersama dengan tingkat penyelesaiannya, b) nilai kontrak konstruksi dan sumber dananya, c) jumlah biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dibayar, d) uang muka kerja yang telah diberikan, dan e) retensi

#### **2.1.1.9 PSAP 09 Tentang Akuntansi Kewajiban**

PSAP 09 membahas tentang klasifikasi, pengakuan dan pengukuran kewajiban.

##### **1. Klasifikasi Kewajiban**

Suatu kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap

mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meski kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, jika : a) jangka waktu aslinya adalah periode lebih dari dua belas bulan, b) entitas tersebut bermaksud untuk membiayai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

## **2. Pengakuan Kewajiban**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai kesepakatan atau pada kewajiban yang timbul. Kewajiban dapat timbul dari : a) transaksi dengan pertukaran, b) transaksi tanpa pertukaran, c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dan d) kejadian yang diakui pemerintah.

## **3. Pengukuran Kewajiban**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya setelah perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai yang dicatat dalam kewajiban tersebut. Pengguna nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dalam masing-masing pos.

### **2.1.1.10 PSAP 10 Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan**

PSAP 10 membahas tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan.

### **1. Koreksi Kesalahan**

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan atau kelalaian. Dalam mengkoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik saldo anggaran lebih atau saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

### **2. Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Para pengguna laporan keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan lain dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan didalam pengakuan, perlakuan dan pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

### **3. Perubahan Estimasi Akuntansi**

Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset, dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan

periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.pengaruh perubahan terhadap laporan operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan perubahan tersebut.

#### **4. Operasi Yang Tidak Dilanjutkan**

Apabila suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban berjalan sampai tanggal penghentian apabila memungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

##### **2.1.1.11 PSAP 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi**

Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi sebagaimana yang dimaksud disajikan oleh entitas pelaporan kecuali : a) laporan keuangan konsolidasi arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, b) laporan keuangan konsolidasi perubahan saldo anggaran lebih yang disusun dan disajikan oleh pemerintah pusat. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan, entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

##### **2.1.1.12 PSAP 12 Tentang Laporan Operasional**

Laporan operasional menyajikan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan surplus/defisit operasional dari satu entitas pelaporan yang

penyajianya disandingkan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan dan beban dalam menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintah. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan dalam satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan. Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan. Informasi dalam laporan operasional adalah sebagai berikut : a) nama entitas pelaporan yang dicakup, b) cakupan entitas pelaporan, c) periode yang dicakup, d) mata uang pelaporan dan e) satuan angka yang digunakan.

Dalam laporan operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan /beban luar biasa dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi. Laporan Operasional disajikan dalam bentuk perbandingan dengan tahun sebelumnya

## **2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

### **2.1.2.1 Kompetensi**

Menurut Moeheriono (2009) kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengidentifikasikan cara berpikir, bersikap dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada suatu waktu tertentu.

Kompetensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Sedangkan menurut Hutapea dan Thoah (2008:8) menyatakan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, kemampuan dan perilaku individu yang dimiliki oleh setiap orang.

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya. Ilmu atau informasi yang dimiliki pegawai dapat digunakan di kondisi nyata dalam pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Keterampilan (*Skills*)

Keterampilan adalah suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan kerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat dibutuhkan oleh pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini dalam berkomunikasi, memotivasi dan mendelegasi. Disamping pengetahuan dan keterampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai.

3. Sikap (*Attitude*)

Sikap merupakan pola tingkah laku seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila pegawai memiliki sikap mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Pengetahuan, keterampilan dan sikap adalah faktor yang menentukan penilaian terhadap kompetensi sumber daya manusia dalam menghasilkan tingkat kinerja pada suatu perusahaan. Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan.

### **2.1.2.2 Sumber Daya Manusia**

Menurut Matindas (2002:89) sumber daya manusia adalah suatu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.

Menurut Sonny Sumarsono (2003:4) menyebutkan bahwa sumber daya manusia mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja dan menghasilkan baranga atau jasa kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melaksanakan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis.

Dalam pengelolaan keuangan yang baik, setiap unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk melaksanakan sistem akuntansi yang ada.

Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah tersebut akan mempengaruhi pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno,2008)

#### **1. Pendidikan Formal**

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang tersrtuktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.



Pendidikan formal dalam organisasi merupakan suatu proses mengembangkan kemampuan kearah yang diinginkan.

Tingkat pendidikan seringkali dijadikan indikator yang menunjukan derajat intelektual seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi tingkat pengetahuannya. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan dilatar belakangi pendidikan akuntansi atau keuangan.

## 2. Pendidikan dan Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai yang sudah dimiliki agar kemampuan pegawai semakin baik. Pendidikan ditingkatkan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja, sedangkan pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini.

Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia memberikan dampak yang baik terhadap kinerja pegawai tersebut sebagai individu. Hal ini jelas akan membawa peningkatan terhadap kinerja organisasi apabila pelatihan dan pengembangan pegawai dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, program pelatihan dan pendidikan bagi pegawai instansi pemerintah pun cukup penting, karena untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang baik dibutuhkan pegawai yang memahami betul cara dan proses penyusunan laporan keuangan.

## 3. Pengalaman Kerja

Pengalaman dapat diperoleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung, pengalaman langsung apabila seseorang pernah bekerja pada suatu organisasi, lalu oleh karena sesuatu meninggalkan organisasi itu

dan pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan pengalaman tidak langsung adalah peristiwa yang diamati dan diikuti oleh seseorang pada suatu organisasi meskipun yang bersangkutan sendiri tidak menjadi anggota daripada organisasi dimana peristiwa yang diikuti dan diamati terjadi (Siagian, 2002).

Pengalaman kerja di suatu organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama seorang pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin banyak pengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut.

Begitu pun penyusunan laporan keuangan daerah, SKPD diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih lama dibidang akuntansi maupun keuangan, karena dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami akuntansi atau keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Berdasarkan dua pengertian yang disebutkan oleh para ahli diatas, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia adalah suatu kesatuan tenaga manusia dalam organisasi yang mampu bekerja menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengelolaan keuangan yang baik, setiap unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk melaksanakan sistem akuntansi yang ada.

### **2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Pusat
- b. Pemerintah Daerah
- c. Satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan.

Sedangkan menurut Bastian (2006) pengertian laporan keuangan adalah laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dalam memenuhi keinginan pemakai laporan, akuntansi keuangan perlu berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat. Oleh karena itu perlu

kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan tersebut (Harahap, 2008).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan dan mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan :

- a. Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi dimasa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan

- d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta dengan jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika

penyajianannya tidak andal maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Karakteristik informasi laporan keuangan yang andal yaitu :

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan

b. Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan hasil yang tidak begitu jauh.

c. Netralis

Informasi diarahkan kepada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

#### **2.1.3.1 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

#### **2.1.3.2 Pengguna Laporan Keuangan**

Identifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik dapat dilakukan dengan melihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi sektor publik. Pihak-pihak tersebut memiliki kebutuhan akan informasi yang disajikan didalam laporan keuangan organisasi sektor publik (Nordiawan,2006).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu : a) Masyarakat, b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, c) pihak yang memberi dan berproses dalam pemberian investasi, donasi, dan pinjaman, dan d) Pemerintah.

#### **2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup aset berupa aset, kewajiban dan ekuitas.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan mencakup penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup penjelasan tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan mengungkapkan apa yang terdapat pada standar akuntansi pemerintah.

Selain keempat komponen laporan keuangan diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatakan bahwa entitas pelaporan diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Keuangan

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dengan basis akrual. Laporan kinerja keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos berikut :

- a. Pendapatan dari kegiatan operasional
  - b. Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi
  - c. Surplus/defisit
2. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam laporan perubahan ekuitas disajikan sekurang-kurangnya pos sebagai berikut :

- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
- b. Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya diisyaratkan dalam standar-standar lainnya yang diakui langsung dalam ekuitas
- c. Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah

## **2.1 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang**

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya, kerangka konseptual ini terdiri dari standar (teknik dan prinsip) praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya, dan standar itu adalah standar akuntansi. Standar akuntansi mencakup peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi.

Standar akuntansi adalah pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah



adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sehingga demikian pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sangat jelas memiliki pengaruh berdasarkan teori diatas. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintah adalah persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Seluruh instansi pemerintah daerah dapat mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

### **2.2.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang**

Sumber daya manusia merupakan pilar utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut (Azhar,2007). Sumber daya manusia adalah salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Guy et al kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi sumber daya manusia yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman dan informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani,2010). Apabila dalam kaitan dengan penyusunan laporan

keuangan maka sumber daya manusia yang berkompeten dapat mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

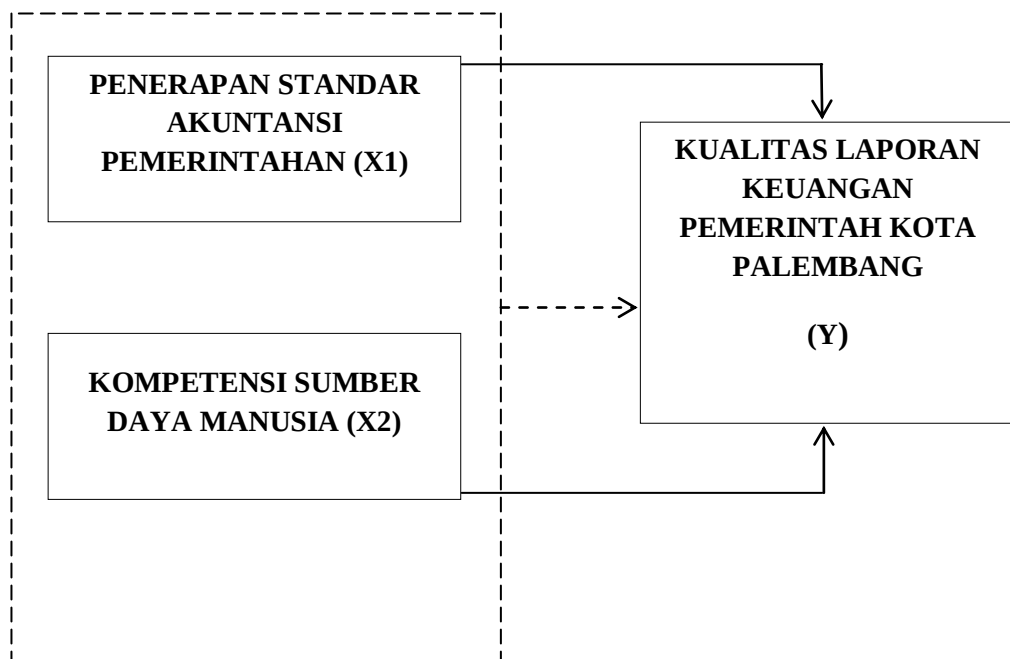
### **2.1.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang**

Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman dan landasan bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan keuangan pemerintah sangat jelas memiliki hubungan berdasarkan teori diatas. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Selain penerapan standar akuntansi pemerintahan, untuk memenuhi kebutuhan akan laporan keuangan yang berkualitas maka harus didukung pula dengan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada.

Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno,2008). Berdasarkan uraian diatas, maka akan disajikan kerangka pemikiran sebagai alur pemikiran dari peneliti sebagai berikut:



Keterangan :

———— = Berpengaruh secara parsial

----- = Berpengaruh secara simultan

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah ringkasan penelitian terdahulu yang telah dirangkum oleh penulis yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini yaitu “ Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.”

Hasil review penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**

| No. | Penulis                            | Variabel                                                                                                                       | Hasil Penelitian                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mia Oktarina, dkk (2016)           | X1= Penerapan standar akuntansi pemerintah<br><br>X2= Kualitas aparatur pemerintah<br><br>Y= Kualitas laporan keuangan         | Penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah berpengaruh baik pada kualitas laporan keuangan            |
| 2   | Dini Widyawati (2015)              | X = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah<br><br>Y = Kualitas Laporan Keuangan                                                | Standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan                                                            |
| 3   | Nurlaila, dkk (2015)               | X1= Penerapan standar akuntansi pemerintah<br><br>Y= Kualitas laporan keuangan pemerintah                                      | Standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan                                                            |
| 4   | Karmila,dkk (2014)                 | X1= Sumber daya manusia<br><br>X2= Pemanfaatan teknologi Informasi<br><br>Y= Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan            |
| 5   | Kadek Hengki Primayana, dkk (2014) | X1= Kapasitas sumber daya manusia<br><br>X2= Pengendalian intern<br><br>Y= Keterandalan pelaporan keuangan                     | Kapasitas sumber daya manusia dan pengendalian intern akuntansi yang baik berpengaruh negatif pada keterandalan pelaporan keuangan |
| 6   | Amries Rusli Tanjung (2014)        | X1= Kapasitas sumber daya manusia<br><br>X2= Pemanfaatan teknologi informasi<br><br>Y= Kualitas laporan                        | Kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan        |

|    |                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | keuangan                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
| 7  | Permadi (2013)      | X = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah<br><br>Y = Kualitas Laporan Keuangan                                                  | Standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan                                                                   |
| 8  | Rukmi Juwita (2013) | X1= Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah<br><br>X2= Sistem Informasi Akuntansi<br><br>Y= Kualitas Laporan Keuangan | Implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan |
| 9  | Kusumah (2012)      | X = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah<br><br>Y = Kualitas Laporan Keuangan                                                  | Standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan                                                                   |
| 10 | Azlim,dkk (2012)    | X1= Penerapan good governance<br><br>X2= Standar akuntansi pemerintah<br><br>Y= Kualitas Informasi Keuangan SKPD                 | Penerapan good governance dan Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD                          |

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Hipotesis masih dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah pada sebuah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2009) . berdasarkan kerangka pemikiran maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> :Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Palembang
- H<sub>2</sub> :Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Palembang
- H<sub>3</sub> :Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Palembang

